IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse *e-ISSN 2775-0205*
Vol. 3 Ed.1. Pages 81 - 109, January - June 2021 *p-ISSN 2776-348X*

Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara

Baiq Ulfa Septi Lestari[1], Lalu Puttrawandi Karjaya[1], Muhammad Sood[1]
[1]Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
[1]Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
[1]Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Baigulfasepti017031@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to analyze why there are differences in South Korea's foreign policy towards North Korean nuclear weapon ownership under the Park Geun Hye and Moon Jae In regimes. This difference can be seen from President Park's policies which tend to be conservative and repressive towards North Korea, while the policies pursued by President Moon tend to be more cooperative and humanist towards North Korea. The two leaders are known to be the best samples representing conservative and cooperative foreign policy towards North Korea. This research found that the differences in the leadership policies of President Park and President Moon were largely influenced by internal and external factors including background, curriculum vitae, values, perceptions, domestic and international situations, reaction actions between countries and interference from other countries. This study uses the theory of foreign decision making, namely internal and external settings, as well as the concept of foreign policy to answer the problem formulation because both are able to explain why these differences in policy can occur. This research also found the fact that policy differences between the two regimes had a major effect on the security stability of South Korea and the Korean Peninsula area where President Moon succeeded in minimizing conflict between the two Koreas by using a cooperative approach and was able to establish good relations with North Korea through his New Sunshine Policy.

***Keywords**: Conservative, Cooperative, Foreign Policy, Internal and External Setting, North Korean Nuclear Weapons.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi perbedaan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap kepemilikan senjata nuklir Korea Utara dibawah rezim Park Geun Hye dan Moon Jae In. Perbedaan ini terlihat dari kebijakan presiden Park yang cenderung konservatif dan represif terhadap Korea Utara, sedangkan kebijakan yang ditempuh presiden Moon cenderung lebih kooperatif dan humanis kepada Korea Utara. Kedua pemimpin dikenal sebagai sampel terbaik yang mewakili kebijakan luar negeri konservatif dan kooperatif terhadap Korea Utara. Penulis menemukan bahwa perbedaan kebijakan kepemimpinan presiden Park dengan presiden Moon dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mencakup latar belakang, riwayat hidup, nilai, persepsi, situasi domestik maupun international, aksi reaksi antar Negara serta adanya campur tangan negara lain. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri yaitu internal dan eksternal setting serta konsep kebijakan luar negeri untuk menjawab rumusan permasalahan karena keduanya mampu menjelaskan mengapa perbedaan kebijakan tersebut bisa terjadi. Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa perbedaan kebijakan diantara kedua rezim berpengaruh besar terhadap stabilitas keamanan Korea Selatan dan kawasan Semenanjung Korea dimana presiden Moon berhasil meminimalisir konflik diantara dua Korea dengan menggunakan pendekatan kooperatif serta mampu menjalin hubungan baik dengan Korea Utara melalui kebijakan *New Sunshine Policy*-nya.

Kata Kunci: Internal dan Eksternal *setting*, Kebijakan Luar Negeri, Konservatif, Kooperatif, Senjata Nuklir Korea Utara.

PENDAHULUAN

Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua negara tetangga yang terletak di kawasan Semenanjung Korea, dimana kedua negara ini dahulu bersatu dibawah entitas politik tunggal yang disebut sebagai negara Korea. Negara Korea sendiri dahulu pernah dijajah oleh Jepang pada masa perang dunia ke-2. Pasca berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan kekalahan Jepang melawan negara-negara sekutu, maka secara otomatis wilayah jajahan Jepang termasuk negara Korea diambil alih oleh negara pemenang perang, dimana wilayah Korea kemudian dikuasai oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. AS kemudian mengambil alih bagian Barat Korea yang kelak akan dikenal sebagai Korea Selatan dan Uni Soviet mengambil alih bagian Barat Korea yang dikenal sebagai Korea Utara. Pada dasarnya, AS dan Uni Soviet memiliki perbedaan ideologi yang mencolok dimana perbedaan ideologi tersebut menyebabkan terjadinya Perang Dingin (Hasan, 2018)

Situasi demikian juga terjadi di Semenanjung Korea dimana kedua negara tersebut mempengaruhi persatuan dari negara Korea. Korea Selatan kemudian menganut paham Demokrasi milik AS dan Korea Utara menganut paham Komunisme milik Uni Soviet. Perbedaan ideologi diantara keduanya tidak hanya berhasil memecah dua Korea yang sebelumnya bersatu, tetapi juga berhasil mendoktrin masyarakat Korea akan ideologi yang dianut. Hal ini bisa dilihat dari pemimpin Korea Utara pertama yaitu Kim Ill Sung yang berambisi menyatukan dua Korea dibawah ideologi Komunis. Demi mewujudkan ambisinya, Kim Il Sung memutuskan untuk meminta bantuan kepada Uni Soviet untuk menaklukan Korea Selatan sehingga menyebabkan terjadinya perang Korea (1950-1953) (Young, 2001, p. 67).

Perang Korea telah menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa, sehingga kedua pihak memutuskan untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953 (Sudirman, 2018). Perjanjian gencatan senjata tersebut bukan suatu bentuk perjanjian damai yang bersifat berkelanjutan, sehingga pada hakikatnya kedua Korea sampai dengan detik ini masih berada dalam keadaan status perang. Menyadari akan hal tersebut, AS kemudian mendirikan pangkalan militer di Semenanjung Korea, sedangkan Korea Utara meminta bantuan Uni Soviet untuk mengembangkan program senjata nuklir untuk menangkal ancaman dari AS dan Korea Selatan. Pengembangan senjata nuklir ini berlangsung sejak tahun 1956, dimana Korea Utara mengadakan sebuah perjanjian dengan Uni Soviet dalam penggunaan damai energi nuklir (Kurniawan, 2015).

Selain mengadakan kerjasama dengan Uni Soviet, Korea Utara juga meminta bantuan kepada Tiongkok pada tahun 1964 untuk mengembangkan senjata nuklir, mengingat negara tersebut sukses melaksanakan uji coba senjata nuklir pertamanya. Sayangnya, keinginan Korea Utara tidak direspon oleh Tiongkok, sehingga negara tersebut memfokuskan kerjasamanya dengan Uni Soviet. Tahun 1965, Korea Utara dan Uni Soviet mendirikan Akademi Militer Hamhung, dimana para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal. Di tahun tersebut, Uni Soviet juga menyediakan bantuan kepada Korea Utara untuk membangun reaktor nuklir di

Yongbyon. Reaktor ini berukuran lebih kecil dibandingkan reaktor nuklir milik negara lain seperti AS, karena ukurannya inilah reaktor Yongbyon tidak menjadi perhatian negara-negara sekitar (Stueck, 1999, pp. 110–112).

Reaktor nuklir di Yongbyon membutuhkan waktu lama untuk memproduksi Plutonium yang cukup bagi bom nuklir, karena fasilitas ini dijalankan secara independen dan fokus pada produksi bahan bakar nuklir. Dengan adanya fasilitas nuklir ini, Korea Utara kemudian memperoleh Plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir sehingga mendorong Kim Il Sung untuk membangun senjata nuklir, dimana sebagian besar keberhasilan Korea Utara ini di dukung oleh Uni Soviet. Meskipun begitu, pada tahun 1979, Korea Utara dikecewakan oleh sikap Uni Soviet dan Tiongkok ketika meminta bantuan lebih jauh untuk mengembangkan teknologi nuklir. Kondisi inilah yang menyebabkan Kim Il Sung pada tahun 1980 memandang bahwa Korea Utara akan mendapatkan senjata nuklir dengan cara bagaimanapun tanpa bantuan siapapun. Oleh karena itu, pada tahun 1980-an, Korea Utara mengurangi ketergantungan bantuan luar dan mengembangkan program nuklirnya sendiri. Upaya Korea Utara ini juga di dukung oleh sumber daya alam yang melimpah, dimana negara tersebut kaya akan batubara, emas, perak uranium, logam langka, bijih besi dan lainnya (Utomo, 2020).

Hasil kekayaan alam ini kemudian diperdagangkan ke Uni Soviet dan Tiongkok, sehingga Korea Utara tetap bisa mendanai pengembangan nuklirnya (Utomo, 2020). Adapun alasan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara yakni: senjata nuklir dapat menangkal serangan AS serta memperkecil ketergantungan Korea Utara terhadap Uni Soviet dan Tiongkok mengingat aliansi Korea Utara dengan keduanya sering mengalami pasang surut, sehingga Kim Il Sung seringkali mempertanyakan kredibilitas komitmen keduanya. Selain itu, senjata nuklir juga dapat meningkatkan posisi tawar Korea Utara dalam meja perundingan internasional. Senjata nuklir juga memberikan jaminan keamanan yang selama ini tidak ditawarkan oleh negara manapun dalam komunitas internasional dan yang terpenting, pengembangan senjata nuklir juga menjadi sumber keamanan rezim bagi Kim Il Sung dan pemimpin berikutnya (Heo & Woo, 2008). Tidak heran jika kemudian Korea Utara fokus pada upaya pembangunan senjata nuklir dan menyebabkan pembangunan senjata nuklir Korea Utara semakin berkembang pesat (*Daftar Negara Dengan Senjata Nuklir Di Dunia: Rusia Terbanyak*, 2020).

Perkembangan pesat senjata nuklir Korea Utara menyebabkannya menjadi ancaman nyata bagi AS dan sekutunya, terutama Korea Selatan mengingat kedua negara saling berdekatan satu sama lain. Sejak pemerintahan presiden pertama Korea Selatan yaitu Syngman Ree sampai dengan Petahana yaitu Moon Jae In, berbagai kebijakan keamanan Korea Selatan selalu berorientasi terhadap Korea Utara. Bedanya, para pemimpin Korea Selatan cenderung menempuh cara yang berbeda dalam merespon ancaman senjata nuklir Korea Utara (Putra, 2016).

Terdapat jenis pemimpin yang cenderung radikal, tegas, isolatif dan keras dan bahkan memilih jalan militer untuk menghadapi Korea Utara (konservatif), dan ada juga pemimpin Korea Selatan yang mengedepankan kerjasama dan perdamaian dengan Korea Utara (Kooperatif Humanis). Adapun pemimpin Korea Selatan yang bersikap konservatif seperti Syngman Ree yang ingin menyatukan dua Korea dengan jalan militer, Park Chung Hee yang dikenal bersikap tegas dan tidak ingin bekerjasama

dengan Korea Utara, serta Kim Young Sam dan Park Geun Hye yang menjalin hubungan kerjasama dengan Korea Utara, tetapi akhirnya kandas karena Korea Utara tidak ingin melakukan denuklirisasi. Sedangkan pemimpin Korea Selatan yang kooperatif terlihat dari presiden Roh Tae Woo yang lebih banyak mengupayakan kerjasama, Kim Dae Jung dengan kebijakan *Sunshine Policy*, serta Roh Moh Hyun dan Moon Jae In yang juga kooperatif terhadap Korea Utara (Putra, 2016, pp. 4–5).

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada kebijakan dua pemimpin Korea Selatan yaitu Park Geun Hye dan Moon Jae In dalam menghadapi ancaman senjata nuklir Korea Utara. Park Geun Hye sendiri dikenal sebagai pemimpin dari kalangan konservatif. Banyak pengamat politik Korea Selatan menganggapnya sebagai pemimpin yang mewakili kebijakan konservatif, sedangkan Moon Jae In dikenal sebagai pemimpin Korea Selatan yang paling kooperatif dalam menghadapi Korea Utara. Oleh karena itu, berdasarkan selayang pandang permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah "Mengapa Terjadi Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dibawah Rezim Park Geun Hye dan Moon Jae In terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara?

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, artikel ilmiah berjudul "Mengurai Kode Politik Korea Selatan: Analisis Terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae In (2017-2018)" oleh Bara Biswara. Tulisan ini membahas secara detail mengenai bagaimana pandangan Moon Jae In terhadap Korea Utara selama satu tahun kepemimpinanya. Penelitian ini menggunakan konsep *Rethorical Map,* dimana konsep ini dapat membantu melihat bagaimana *degree of emphasize* yang merupakan basis pemikiran geopolitik yang dimiliki seorang pembuat kebijakan terhadap suatu wilayah atau negara. Literatur ini tidak membahas secara detail hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara karena hanya berfokus pada retorika Moon Jae In terhadap negara-negara di dunia seperti Korea Utara, AS, Tiongkok, Jepang dan Rusia.

Bara Biswara menegaskan bahwa Korea Utara menduduki posisi yang paling unik dimana dalam retorika Moon Jae-in, Korea Utara tidak hanya dipandang sebatas lawan, melainkan juga kawan potensial sekaligus 'lawan potensial'. Korea Utara dianggap lawan potensial karena kepemilikan senjata nuklirnya, sedangkan ia juga dianggap kawan potensial karena terdapat beberapa potensi kerjasama ekonomi diantara kedua negara, termasuk kerjasama ekonomi. Penulis menegaskan bahwa saat ini, Moon Jae In tengah mengupayakan Korea Utara sebagai kawan potensial bagi Korea Selatan melalui peningkatan kerjasama yang sebelumnya sempat terputus di masa pemerintahan Park Geun Hye. Hal tersebut selaras dengan penelitian penulis mengenai upaya kooperatif Moon dalam merangkul Korea Utara sebagai kawan bagi Korea Selatan (Biswara, 2018).

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Faizah Nadhiva yang berjudul "*Reorientation of The Republic of Korea Foreign Policy Toward The Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019)".* Tulisan ini membahas tentang dinamika kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara dimulai dari masa pemerintahan Kim Youm Sam (1993-1998), Kim Dae Jung (1998-2003), Roh Moh Hyun (2003-2008), Lee Myung Bak (2008-2013), Park Geun

Hye (2013-2017) dan Moon Jae In (2017-sekarang). Selain membahas berbagai kebijakan yang ditempuh oleh para pemimpin Korea Selatan, penelitian ini juga membahas reorientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara dibawah rezim Moon Jae In. Hasil reorientasi diplomasi dibawah rezim Moon Jae In membuktikan bahwa prospek perdamaian diantara kedua Korea lebih terbuka lebar. Misalnya pasca *Inter Korean Summit,* hubungan antar dua Korea meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah perubahan dalam komitmen militer yang tercipta melalui *Pyeongyang Declaration.* Kedua Korea setuju menghentikan provokasi militer dan membangun zona demiliterisasi (DMZ).

Hal ini diawali dengan kerjasama dua Korea dalam menyingkirkan bahan peledak yang ditanam disekitar wilayah DMZ. Kedua Korea juga melakukan penarikan beberapa anggota militer di *Joint Security Area* (JSA) di wilayah Panmunjom. Wilayah ini merupakan daerah keamanan bersama dimana kedua tentara saling berhadapan secara langsung. Kedua Korea juga melakukan pelucutan senjata. Hal ini mengartikan bahwa komitmen diplomasi antar kedua negara berhasil mewujudkan adanya langkah-langkah non agresi dari kedua Korea. Hal tersebut menunjukkan perbedaan dengan pendekatan yang ditempuh pemimpin-pemimpin konservatif sebelum Moon Jae In (Lee Myung Bak dan Park Geun Hye dan lainnya) yang selalu menekankan sanksi dan pemutusan hubungan kerjasama dengan Korea Utara, sehingga prospek perdamaian semakin sulit tercapai. Penelitian oleh Faizah Nadhiva ini selaras dengan penelitian penulis yang menganggap bahwa Moon Jae In dianggap mampu menciptakan prospek perdamaian di Semenanjung Korea melalui kebijakan kooperatifnya (Nadhiva, 2018).

Literatur ketiga ditulis oleh Siska Ayu Anggraini dan Faisyal Rani dalam sebuah jurnal yang berjudul “Motivasi Park Geun Hye Menerapkan Kebijakan Trust Politic Dalam Menghadapi Korea Utara Pada Tahun 2013-2016”. Tulisan ini membahas secara umum dan rinci mengenai alasan mengapa Park Geun Hye mengeluarkan kebijakan *Trust Politic* dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor masa lalu Park Geun Hye memiliki pengaruh yang besar dalam pelaksanaan kebijakan *Trust Politic*. Literatur ini memberikan informasi bahwa pengalaman Park Geun Hye yang tidak menyenangkan akibat ibunya yang terbunuh oleh simpatisan Korea Utara, serta ayahnya selaku presiden Korea Selatan, Park Chung Hee, yang konsisten menetapkan kebijakan keras dan selalu mendoktrin anaknya bahwa Korea Utara negara yang kejam akhirnya menjadikan Park Geun Hye sebagai sosok yang progresif, keras dan idealis (Anggaraini & Rani, 2019).

Trust Politic milik Park Geun Hye kurang bersifat ideologis tetapi lebih pragmatis dan bertujuan menghindari eskalasi lebih lanjut serta terhindar dari upaya pemerasan oleh Korea Utara. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana penerapan *Trust Building Process on The Korean Peninsula* yang merupakan bentuk nyata *Trust Politic,* dimana Korea Selatan menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan mendapatkan apapun dari ancaman dan provokasi yang dibuatnya sembari mendesak negara tersebut untuk membangun kepercayaan dengan selalu menghargai perjanjian diantara keduanya dan mengikuti norma internasional. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian Anggraini dan penulis adalah fokus kajian dan subtansi penelitian, seperti tidak dijelaskannya pengaruh lingkungan domestik (Partai Saenuri) dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Adapun persaman yang membantu penulis adalah

penggunaan konsep pengambilan keputusan oleh Richard Snyder melalui teori internal dan eksternal *setting*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan makna di balik realita serta berpijak pada realita atau peristiwa yang berlangsung. Alat pengumpulan data dari pendekatan ini adalah peneliti itu sendiri yang juga disebut sebagai *human instrument.* Berkenaan dengan hal tersebut, pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini berkaitan erat dengan studi pustaka atau studi literatur *(Library Research)*. Metode yang digunakan sifatnya eksplorasi literatur, referensi dan sumber rujukan yang didapatkan di ruang perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, perjanjian, laporan resmi, pernyataan kebijakan, surat kabar, artikel maupun akses internet untuk menjangkau data dalam jaringan. Hal ini dikarenakan penulis belum dapat terjun langsung ke lokasi penelitian di Korea Selatan dan berpatokan pada hasil penelitian pihak-pihak yang telah turun langsung ke lapangan.

KERANGKA PEMIKIRAN

TEORI PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI *INTERNAL* DAN EKSTERNAL *SETTING*

Salah satu bentuk dari teori politik luar negeri dicetuskan oleh Richard Snyder. Teori politik luar negeri yang telah dirumuskan oleh Richard Snyder dalam model pembuatan keputusan (*the decision-making model*) menegaskan bahwa perilaku politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor dari internal dan eksternal. Berikut ini adalah bagan *internal* dan *external setting* oleh Richard Snyder:

Gambar 1. Bagan Teori *Internal* dan Eksternal Setting Richard C. Snyder

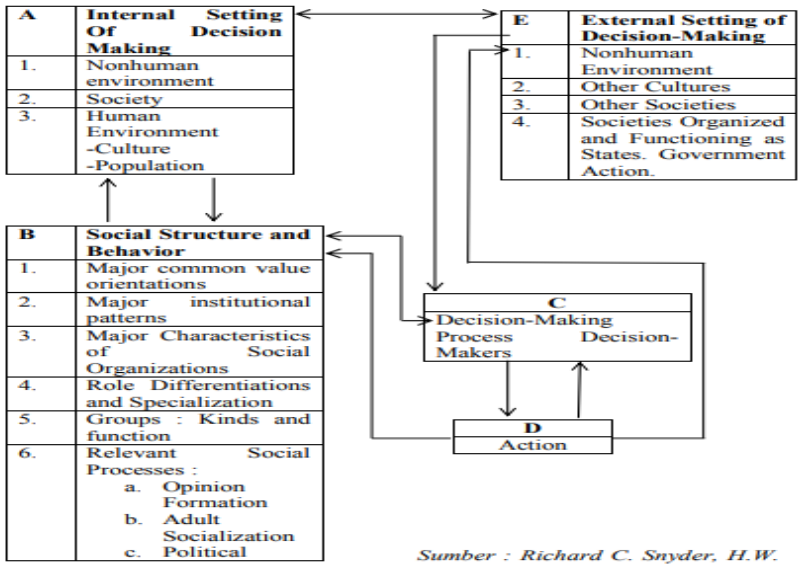

Sumber : Richard C. Snyder, H.W. Bruck, Burton Sapin, 1962, Foreign Policy Decision-Making, An Approach to the study of International Politics, The Free Press of Glencoe

Sumber: (Rosyidin, 2010, p. 152)

Berdasarkan bagan tersebut, dapat diketahui bahwa prosedur perumusan politik luar negeri bersifat kompleks, dimana nilai dalam kebijakan luar negeri berasal dari faktor *internal* dan *external setting*. Bagan A merupakan internal setting *of decision making*, yang di dalamnya terdapat beberapa faktor seperti lingkungan, batas teritori dan sumber daya alam, masyarakat, kebudayaan. Bagan B merupakan *social structure and behavior*, yang di dalamnya terdapat beberapa faktor seperti nilai-nilai umum, pola utama kelembagaan, karakteristik utama organisasi sosial, peran diferensiasi dan spesifikasi, kelompok kepentingan serta opini publik. Baik bagan A maupun B sama-sama merupakan bagian dari faktor *internal setting*.

Sedangkan faktor eksternal berada pada bagan E, dimana faktor-faktor eksternal ini berasal dari lingkungan negara lain, kebudayaan negara lain, masyarakat dan pemerintah negara lain serta masyarakat atau organisasi internasional. Bagan A, B dan E inilah yang mempengaruhi para *decision makers* dimana output dari segala proses tersebut yaitu kebijakan. Pada bagan A, faktor dominan yang akhirnya mempengaruhi kebijakan diantara Park Geun Hye Moon Jae In berasal dari lingkungan manusia (*human environment*), pada bagan B faktor yang dominan seperti pola utama kelembagaan (*major institutional patterns*), proses sosial yang relevan seperti pembentukan sosialisasi (*adult socialization*) dan formasi opini publik *(opinion formation).* Sedangkan pada bagan E, faktor eksternal yang paling dominan berasal dari tindakan pemerintah negara lainnya serta aksi reaksi antar negara (*societies organized and function as state government*).

KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Kebijakan luar negeri sendiri merupakan suatu perangkat, formula, sikap, nilai arah dan sasaran untuk mempertahankan dan mengamankan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional. Artinya, kebijakan luar negeri juga memuat strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, terdapat tiga sumber landasan pembuatan sumber kebijakan luar negeri Korea Selatan oleh Park Geun Hye dan Moon Jae In dalam memandang kepemilikan senjata nuklir Korea Utara (Holsti, 1992, p. 83).

Ketiga landasan tersebut yakni *external sources* (sumber eksternal) yang mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal berupa kebijakan dan tindakan dari negara lain baik berupa konflik, ancaman, kerjasama dan dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. *Governmental Sources* (sumber pemerintah) yang meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintah yang memberikan pertimbangan akan pilihan kebijakan luar negeri, baik yang sifatnya memperluas atau membatasi pilihan yang akan diambil oleh para pembuat keputusan, tentunya dalam lingkungan dan interaksi antar pihak di dalam pemerintah. Ketiga, *Individual Sources* (sumber individu) yang mencakup nilai, ideologi, pengalaman hidup, masa kecil, latar belakang dan segala sesuatu yang mempengaruhi persepsinya, karakter dan lainnya yang sangat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan (Holsti, 1992, p. 83).

HASIL DAN PEMBAHASAN

DINAMIKA HUBUNGAN KOREA SELATAN-KOREA UTARA DIBAWAH KEPEMIMPINAN PARK GEUN HYE

Pada masa pemerintahan Park Geun Hye (2013-2017), koridor utama kebijakannya terhadap Korea Utara disebut dengan kebijakan *Trust-Politic* yang dibentuk dalam konteks hubungan bilateral serta upaya reunifikasi. Kebijakan *Trust Politic* yang dijalankan oleh Park Geun Hye dalam upaya reunifikasi didasari pada pembangunan kepercayaan terhadap Korea Utara. Dari berbagai kebijakannya tersebut, Park Geun Hye tetap berpegang pada satu kepentingan utama: mewujudkan denuklirisasi Korea Utara ditengah tingginya instensitas konflik di Semenanjung Korea. Park Geun Hye merasa bahwa kepemilikan senjata nuklir Korea Utara adalah ancaman nyata sehingga Park tetap konsisten mendorong Korea Utara untuk bergabung dalam *Non Proliferation Nuclear* (Ku, 2019). Park Geun Hye juga melihat bahwa selama ini, Korea Utara selalu mengambil keuntungan dengan menyeret AS dan Korea Selatan di dalam meja perundingan.

Hal ini menyebabkan *image* Korea Utara dalam pandangan Park Geun Hye adalah negara yang licik dan penuh tipu muslihat. Hal ini disebabkan karena Korea Utara melakukan aksi provokasi dengan kapasitas berupa *bargaining position* dari senjata nuklir untuk mendapatkan berbagai dana dan bantuan kemanusiaan. Selama ini, Korea Selatan dan AS mengikuti keinginan Korea Utara untuk duduk di meja perundingan, memberikan berbagai bantuan dana dan kemanusiaan dengan harapan Korea Utara bersedia melakukan pelucutan senjata serta transparan dalam pengembangan senjata nuklir (Saeed & Przystup, 2011, pp. 29–30). Ketika semua keinginan Korea Utara dipenuhi, negara tersebut justru mengkhianati kesepakatan dengan tetap mengembangkan senjata nuklir serta melakukan aksi provokasi untuk menyeret kembali AS dan Korea Selatan di meja perundingan. Oleh karena itu, Park Geun Hye merasa bahwa tindakan kooperatif tidak efektif karena Korea Selatan selalu mengalah menghadapi sikap keras kepala Korea Utara. Akibatnya, Park Geun Hye semakin konsisten dalam menerapkan kebijakan konservatif yang kemudian diterapkannya dalam kebijakan yang akan dijelaskan dibawah ini:

KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERHADAP SENJATA NUKLIR KOREA UTARA DIBAWAH KEPEMIMPINAN PARK GEUN HYE

1. Menerapkan Trust Building Process

Akibat tingginya sikap tidak percaya Park Geun Hye terhadap Korea Utara, Ia memutuskan untuk menerapkan satu kebijakan yang disebut sebagai *Trust Building Process*. Inti utama dari kebijakan ini yaitu untuk membantu Korea Utara maju dengan meninggalkan program nuklirnya melalui berbagai upaya kerjasama, terutama kerjasama ekonomi. *Trust Building Process* mencerminkan keseimbangan kerjasama dan kebijakan tegas terhadap provokasi yang nantinya mungkin akan terjadi di semenanjung Korea. Meskipun *Trust Building Process* menjadi harapan yang besar bagi semenanjung Korea, pada akhirnya kebijakan ini harus berakhir karena adanya provokasi Korea Utara pada Januari 2016 yang dianggap telah melanggar perjanjian kebijakan *Trust Building Process* (Snyder, 2016, p. 106).

Dalam kasus ini, Korea Utara telah merusak kepercayaan yang ada di Semenanjung Korea dengan memperlihatkan fakta bahwa negara tersebut masih menjalankan dan mengembangkan program nuklirnya dan Korea Utara dalam sikap provokasinya tersebut juga telah mengancam keamanan domestik Korea Selatan. Hal itu menegaskan bahwa Korea Utara telah melanggar isi dari *Trust Building Process* yang memiliki prinsip, tujuan, maupun inisiatif untuk melangsungkan hubungan yang normal tanpa adanya ancaman nuklir. Sebagai konsekuensinya, maka Park Geun Hye kemudian memutuskan berbagai upaya damai seperti kerjasama dengan Korea Utara, serta tidak lagi ingin menjalin hubungan apapun dengan negara tersebut yang mengakibatkan Korea Utara semakin agresif terhadap Korea Selatan. Pada akhirnya, kebijakan ini tidak berjalan lancar sebagai akibat dari tidak terealisasinya denuklirisasi, uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara serta ditutupnya upaya dialog dan kerjasama oleh Park Geun Hye yang menyebabkan upaya damai di Semenanjung Korea terhenti (Anggaraini & Rani, 2019).

2. Menutup Kaesong Industrial Complex (KIC)

Kaesong Industrial Complex (KIC) atau Kawasan Industri Kaesong adalah sebuah kawasan industri yang terletak di Korea Utara yang lokasinya tepat berada di seberang zona demiliterisasi Korea Selatan. Awalnya, proyek ini diresmikan pada tahun 2004 dan sebagian besar biayanya ditanggung oleh Korea Selatan sebagai usaha untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan baik dengan Korea Utara. Korea Selatan mengklaim bahwa tujuan dibentuknya KIC adalah untuk mengembangkan industri Korea Selatan dengan menyerap tenaga kerja dari Korea Utara. Perspektif Korea Selatan menyatakatan bahwa hal ini akan membantu Korea Utara untuk memulai reformasi ekonominya, mengingat saat itu Korea Utara membutuhkan sumber daya ekonomi serta untuk meredakan ketegangan antar Korea Selatan. KIC dengan cepat telah menjadi simbol kerjasama dan simbol hubungan kuat antar dua Korea (Yun, 2013). Meskipun KIC telah menjadi simbol perdamaian antar dua Korea, kawasan ini sudah dua kali ditutup secara sepihak.

Pertama, penutupan dilakukan oleh Korea Utara sebagai respon atas kebijakan keras presiden Lee Myung Bak. Kedua, penutupan KIC kembali terjadi pada tahun 2016 sebagai akibat dari uji coba senjata nuklir, serta beberapa upaya agresif Korea Utara terhadap Korea Selatan (Hu, 2016). Hal ini semakin diperparah dengan temuan PBB bahwa Korea Utara telah memanfaatkan pendapatan dari KIC secara tidak bijak karena digunakan untuk meningkatkan senjata nuklir dan rudal jarak jauh. Park Geun Hye menyampaikan bahwa tidak dapat disangkal jika pendekatan dan niat baik yang selama ini diusahakan Korea Selatan sama sekali tidak akan bekerja dalam melawan tekad Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir (Y. H. Park, 2014). Pasca penutupan KIC oleh Park Geun Hye, hubungan antar dua Korea semakin memburuk, bahkan tidak ada upaya kerjasama dan dialog yang dilakukan oleh dua Korea untuk menormalisasi hubungan bilateral. Penutupan KIC oleh Park Geun Hye seolah menjadi pertanda akhir dari segala bentuk kerjasama dan hubungan baik dengan Korea Utara (Choe, 2016).

3. Memutus dan Mengurangi Bantuan Kemanusiaan ke Korea Utara

Dalam sektor swasta, jumlah bantuan dari Korea Selatan untuk Korea Utara dibawah rezim Park Geun Hye hanya mencapai 5,1 miliar won (US $ 5 juta). Jumlah ini tidak berarti jika dibandingkan dengan 90,9 miliar won (US $ 89,3 juta) yang disetujui pada tahun 2007 pada pemerintahan Roh Moo Hyun, tetapi hanya seperenam dari rata-rata tahunan sebesar 31,0 miliar won ($ 30,5 juta) selama pemerintahan Presiden Lee Myung Bak. Pada masa pemerintahan Park, di tahun 2016, bahkan tidak ada bantuan nyata yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan kepada Korea Utara karena semua hubungan kerjasama telah diputus. Pada masa rezim Park Geun Hye, jumlah bantuan kemanusiaan ke Korea Utara mencapai titik terendah, bahkan mengalahkan kecilnya jumlah bantuan kemanusiaan oleh Lee Myung Bak yang juga dikenal sangat konservatif terhadap Korea Utara (Wijaya, 2012).

DINAMIKA HUBUNGAN KOREA SELATAN-KOREA UTARA DIBAWAH KEPEMIMPINAN MOON JAE IN

Jika sebelumnya hubungan antar dua Korea semakin memburuk akibat kebijakan konservatif Park Geun Hye serta sikap keras kepala Korea Utara, situasi berbeda justru terjadi di masa Moon Jae In dengan pendekatan kooperatifnya. Ia adalah presiden Korea Selatan ke-12 yang dikenal sebagai pemimpin Korea Selatan keturunan Korea Utara. Sebagai pemimpin yang memiliki cita-cita untuk menyatukan dua Korea serta menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea, Moon Jae In lebih banyak mengupayakan kebijakan kooperatif untuk merangkul Korea Utara. Hal ini dilakukannya karena Ia menyadari bahwa menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea tidak bisa hanya dilakukan oleh Korea Selatan saja, sehingga Moon memandang bahwa sudah saatnya Korea Selatan dan Korea Utara bersama-sama menciptakan perdamaian di kawasan. Tentunya hal ini tidak mudah mengingat Moon Jae In mewarisi situasi sulit akibat ketidakberhasilan pemimpin sebelumnya, yakni Park Geun Hye dalam menghadapi Korea Utara. Oleh karena itu, Moon Jae In memutuskan untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara dimana kebijakan tersebut membuka prospek perdamaian antar dua Korea.

Faktor keberhasilan ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Moon Jae In yang cenderung menyelesaikan segala permasalahan dengan negosiasi dan menjalin komunikasi dengan Korea Utara. Tercatat, Moon Jae In berhasil menemui Kim Jong Un secara langsung sebanyak 3 kali yang mana hal ini tidak pernah sekalipun dilakukan oleh Park Geun Hye. Tidak hanya komunikasi secara langsung, Moon juga diketahui rutin saling berkirim surat dengan Kim Jong Un. Sikap Moon Jae In nyatanya berhasil membuat Korea Utara melunak, meskipun terkadang negara tersebut tetap melakukan aktivitas militernya. Namun, Moon Jae In lebih berupaya untuk menyelesaikan semuanya dengan cara negosiasi dan diplomasi. Respon baik yang diterima Moon Jae In dari Korea Utara ini menyebabkan Ia konsisten menempuh kebijakan yang lebih terbuka dan humanis kepada Korea Utara, sehingga aksi-reaksi yang muncul antara dua Korea di masa pemerintahan Moon Jae In cenderung kooperatif (Wirayudha, 2018).

KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN DIBAWAH REZIM MOON JAE IN TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

1. Mengadakan Deklarasi Panmunjom

Panmunjom merupakan sebuah kawasan kecil yang terletak di 48 km barat laut kota Seoul dan 10 km dari kawasan Kaesong. Kawasan ini terletak di tengah dua Korea dan dijadikan sebagai Zona Demiliterisasi (DMZ) sejak tahun 1953 (Reiter, 2012). Kawasan Panmunjom seringkali disebut sebagai Balai Perdamaian Antar Korea. Oleh karena itu, Panmunjom dirasa tepat untuk mendeklarasikan kesepakatan di antara kedua pemipin Korea ini mengingat bahwa kawasan Panmunjom merupakan zona netral di antara keduanya (Korea.net, 2018).

Selain itu, salah satu poin yang berada pada Deklarasi Panmunjom menyatakan bahwa kemerdekaan nasional harus diinisiasi dan diwujudkan oleh bangsa Korea sendiri, maka kawasan Panmunjom pun dipilih, Deklarasi ini secara resmi ditandatangani pada 28 April 2018 dengan agenda menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan reunifikasi dua Korea. Kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam menyelesaikan isu kemanusiaan yang terjadi akibat pemisahan dua Korea (Korea.net, 2018). Moon Jae In sejatinya cenderung memanfaatkan Deklarasi Panmunjom untuk menyelesaikan permasalahan dengan Korea Utara (General Assembly Security Council, 2017). Deklarasi Panmunjom juga merupakan langkah strategis Moon Jae In untuk mengusahakan negara Korea Selatan yang kuat, aman serta memiliki landasan ekonomi yang kokoh (2018 Inter-Korean Summit Preparation Committee, 2018).

Moon Jae In tidak hanya memperhitungkan dampak positif deklarasi terhadap Korea Selatan, namun Ia juga memikirkan dampak positif deklarasi terhadap Korea Utara, sehingga kesekapatan dari deklarasi ini harus bersifat *win-win solution.* Reaksi menyegarkan dari Korea Utara akibat kebijakan Moon Jae In yang dianggap lebih baik menyebabkan negara Komunis tersebut cenderung lebih melunak. Respon baik yang diterima Moon Jae In dari Korea Utara ini menyebabkan Ia konsisten menempuh kebijakan yang lebih terbuka dan humanis kepada Korea Utara, sehingga aksi-reaksi yang muncul antara dua Korea di masa pemerintahan Moon Jae In cenderung kooperatif. Meskipun begitu, jika Korea Utara kemudian melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, maka Moon Jae In juga bisa bersikap tegas, tetapi tidak melakukan tindakan seperti memutus hubungan kerjasama secara permanen seperti yang dilakukan Park Geun Hye (K.-S. Kim, 2001).

2. New Sunshine Policy

New Sunshine Policy adalah kebijakan yang diinisiasi oleh Moon Jae In sebagai kelanjutan dari kebijakan *New Sunshine Policy* yang dibentuk oleh Kim Dae Jung pada tahun 1998. *Sunshine Policy* dibuat untuk merangkul Korea Utara agar bisa membuka diri terhadap masyarakat internasional dan secara perlahan dapat melakukan kerjasama. Hal ini mengingat bahwa Korea Utara sendiri dikenal sebagai negara isolatif dan sangat tertutup terhadap dunia internasional, karena Korea Utara lebih memilih menjalankan pemerintahan dengan cara mereka sendiri tanpa bantuan dan campur tangan negara lain (J. Kim, 2018). Ketika Moon Jae In menjadi presiden Korea Selatan, Ia kemudian memiliki formula baru dalam

mengimplementasikan *Sunshine Policy*, tetapi koridornya tetap sama seperti kebijakan yang diinisiasi oleh Kim Dae Jung. Kebijakan oleh Moon Jae In ini kemudian dikenal sebagai *New Sunshine Policy* (Straub, 2018, pp. 26–27).

Adapun strategi Moon Jae In untuk mencapai *New Sunshine Policy* tersebut yakni; menangani isu hubungan antar dua Korea dan ancaman nuklir Korea Utara disaat bersamaan, mengambil langkah pendekatan yang komprehensif, membangun pondasi unifikasi damai melalui kerjasama saling menguntungkan serta memastikan keberlanjutan melalui institusionalisasi. Moon Jae In berusaha untuk bersikap netral melalui kebijakan *New Sunshine Policy* (S. Kim, 2020). Ia menempatkan Korea Selatan diantara Korea Utara dan AS, dimana Korea Selatan menjadi fasilitator bagi kedua negara untuk mencapai kesepakatan damai (Power, 2020).

Hal ini bisa dipahami karena AS masih memiliki pengaruh besar di Semenanjung Korea, sehingga negara tersebut harus dilibatkan (Power, 2020). Pada satu sisi, Korea Selatan tidak mungkin bisa melepaskan payung perlindungan keamanan AS, namun untuk bisa mendekati Korea Utara, maka Korea Selatan harus mengambil posisi teraman, yakni mengambil sikap netral dengan tidak terlalu memihak pada AS dan juga tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan Korea Utara (Wong, 2019). Dengan demikian, *New Sunshine Policy* tidak lagi menggantungkan perdamaian kepada pihak luar dengan hanya menuruti kemauan dan keputusan dari AS (bersikap pasif), tetapi Korea Selatan di era Moon Jae In juga bersikap lebih aktif dalam upaya perdamaian dengan tidak lagi hanya menerima masukan, tetapi juga mampu mendesak, memberi masukan dan mengarahkan negara-negara tersebut untuk bersama-sama menciptakan upaya damai di Semenanjung Korea (Pardo, 2018).

3. Meningkatkan Bantuan Kemanusiaan ke Korea Utara

Bantuan dana kemanusiaan di era Moon Jae In meningkat drastis, dimana ia mengalokasikan 10% anggaran negara untuk diberikan kepada Korea Utara. Pada tahun 2019, Korea Selatan memberikan bantuan dana sebesar 115 miliar dolar. Kemudian pada tahun 2017, Moon Jae In mengirimkan bantuan senilai 106 miliar dolar. Semua bantuan tersebut berbentuk obat-obatan, makanan, minuman dan lainnya. Kebijakan Moon Jae In kemudian direspon dengan baik oleh Korea Utara sehingga hubungan keduanya menjadi lebih mesra (Hasibuan, 2020).

Hubungan kedua negara yang cenderung lebih baik juga terlihat pada tahun 2020, dimana Kim Jong Un mengirimka surat kepada Moon Jae In yang berisikan keprihatinannya terhadap bencana Corona Virus (Covid-19) di Korea Selatan (Hasibuan, 2020). Kedua pemimpin Korea ini memang sering bertukar pesan melalui surat atau telepon sehingga komunikasi antar dua Korea terjalin dengan baik. Selain itu, Moon Jae In juga mengajak AS untuk bersama-sama membantu Korea Utara dalam menghadapi Covid-19 yang akhirnya menyebabkan kedua negara setuju memberikan bantuan kepada Korea Utara berupa bantuan obat-obatan, fasilitas medis, bahan pangan dan lainnya (Handayani, 2020). Sikap kooperatif Moon Jae In ini ditunjukkan agar situasi perdamaian dapat tercipta untuk dua Korea.

ANALISIS PERBEDAAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI PARK GEUN HYE DAN MOON JAE IN TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

1. Faktor Internal dan Eskternal Park Geun Hye

A. Internal Setting of Decision Making of Park Geun Hye

- Terancamnya Kepentingan Nasional Korea Selatan *(Human Environment)*

Faktor internal yang menyebabkan Park Geun Hye cenderung menempuh kebijakan tegas terhadap Korea Utara adalah persepsi dirinya yang muncul akan ancaman dari kepemilikan senjata nuklir Korea Utara yang dianggap dapat mengancam kepentingan nasional Korea Selatan, terutama dalam hal ini kepentingan keamanan dan ekonomi (situasi domestik). Dari segi kepentingan ekonomi, uji coba senjata nuklir Korea Utara terbukti menyebabkan ketidakstabilan saham Korea Selatan. Misalnya, saham *Samsung Electronics* diperdagangkan lebih rendah sebesar 2,4 persen. Sedangkan untuk indeks kospi berjangka terpantau turun -0,95 poin atau -0,40 persen pada posisi 235.45 turun dari penutupan sebelumnya pada 236.40. Namun beberapa perusahaan raksasa di Korea Selatan seperti FIRSTEC (perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan dan persenjataan) justru mendapatkan keuntungan ketika situasi di Semenanjung Korea tegang (Situmorong, 2016).

Saham FIRSTEC naik menjadi 20,76 persen dan menumpahkan beberapa keuntungan untuk perdagangan 4,87 persen lebih tinggi (Situmorong, 2016). Kondisi ini menyebabkan perekonomian Semenanjung Korea tidak stabil, Hal ini juga ditandai dengan menurunnya ekspor Korea Selatan akibat provokasi Korea Utara. Park Geun Hye kemudian memutuskan untuk tetap menekan Korea Utara agar mau melakukan denuklirisasi. Ia juga beranggapan bahwa selama ini Korea Utara selalu mengambil keuntungan dengan menekan negara lainnya untuk duduk di meja perundingan melalui ancaman senjata nuklir, memeras Korea Selatan agar mau memberikan bantuan dana, kebutuhan pangan dan obat-obatan dengan dalih akan memberikan serangan jika keinginannya tidak dipenuhi. Bagi rezim Park Geun Hye, untuk memulihkan perekonomian Korea Selatan dari provokasi senjata nuklir Korea Utara adalah dengan cara terus menekan negara tersebut agar mau melakukan denuklirisasi, mengingat senjata nuklir adalah aset terbesar Korea Utara (Ku, 2019, pp. 112–113).

Keberadaan senjata nuklir Korea Utara juga mengancam kepentingan keamanan Korea Selatan, dimana kepemilikan senjata nuklir Korea Utara menyebabkan Korea Selatan merasa cemas mengingat sikap Korea Utara yang tidak stabil, berani dan sering memicu permusuhan akan memantik munculnya konflik yang lebih besar. Korea Utara sendiri memiliki misil yang keseluruhannya mengarah langsung ke beberapa kota besar di Korea Selatan termasuk Seoul, Gwangju, Incheon, Daejeon, Yeongcheon dan Cheongju. Korea Utara bahkan pada bulan Agustus 2015 pernah meluncurkan rudal di dekat pemukiman warga di kota wilayah Yeongcheon, provinsi Gyeonggi yang menyebabkan kepanikan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam kejadian ini, tidak ada jumlah korban yang tewas atau

terluka. Namun, tindakan Korea Utara ini menyebabkan Park Geun Hye semakin khawatir akan perkembangan senjata Korea Utara yang dapat mengancam keamanan nasional Korea Selatan (KBS World, 2020).

Oleh karena itu, Park Geun Hye menganggap bahwa denuklirisasi adalah penyelesaian utama untuk menjaga kepentingan keamanan nasional Korea Selatan. Cara untuk mencapainya adalah dengan tetap memberikan sanksi, memutus bantuan dan kerjasama dengan Korea Utara, dimana semua tekanan ini diharapkan membuat Korea Utara mau melakukan denuklirisasi (KBS World, 2020). Selain karena secara nyata pernah memberikan serangan secara langsung ke wilayah Korea Selatan, negara tersebut juga diketahui telah berhasil mengembangkan senjata ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*) yang dapat membawa senjata nuklir di dalamnya. Rudal ICBM Korea Utara disinyalir bahkan dapat mencapai sebagian besar negara-negara bagian AS. Dengan menggunakan rudal Taepodong 2 yang daya jangkau 10.000 kilometer, analisis ahli pertahanan AS dan Korea Selatan meyakini bahwa rudal tersebut dapat menjangkau wilayah kontinental AS, yang mana wilayah tersebut ditempati sekitar 120.6 juta orang atau 38 persen dari populasi AS (United Kingdom Parliement: House of Commons Foreign Affairs, n.d.).

B. Social Structure and Behaviour of Park Geun Hye

- Berasal dari Partai Konservatif Korea Selatan (*Major Institutional Patterns*)

Sikap idealis dan konservatif Park Geun Hye ini dapat dianalisis berdasarkan organisasi politik tempat ia bernanung. Park diketahui berasal dari Partai Saenuri yang merupakan partai konservatif Korea Selatan. Partai tersebut disebut sebagai partai konservatif, karena partai ini berisikan kaum konservatif pro bisnis terutama terhadap *Chaebol* (Konglomerat Korea Selatan) yang dikenal anti Komunis yang mendukung pendirian konfrontatif dan garis keras melawan musuh mereka. Partai ini lebih menyukai hubungannya dengan AS, baik itu hubungan ekonomi maupun keamanan. Pendukung partai ini berasal dari generasi lebih tua yang hidup melalui kemiskinan sebelum industrialiasi yang pesat dan provinsi Tenggara Korea Selatan. Tidak hanya Park Geun Hye yang keras dalam menghadapi Korea Utara, presiden sebelumnya yang berasal dari partai yang sama, Lee Myung Bak, juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan keras terhadap Korea Utara (Lee, 2013, pp. 63–64).

Keduanya juga tidak melanjutkan kebijakan *sunshine policy* serta sering memutuskan secara sepihak hubungan kerjasama dan pemberian bantuan kemanusiaan ketika Korea Utara melanjutkan pengembangan nuklirnya. Partai Saenuri juga dikenal sebagai partai yang memiliki hubungan erat dengan militer. Hal ini bisa dilihat dari terpilihnya Menteri Pertahanan, Han Min Koo serta ketua *National Security Office*, Kim Kwan Jin sebagai penasihat Park Geun Hye dalam urusan kebijakan luar negeri. Kedua tokoh ini dikenal sebagai sosok yang sangat konservatif serta berpengaruh besar dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Korea Utara. Latar belakang keduanya yang murni militer membuat keduanya

cenderung bergerak tanpa mempertimbangkan persepsi publik. Tidak heran kemudian partai oposisi melayangkan protes kepada Partai Saenuri karena secara nyata menunjukan bahwa isu militer seharusnya tidak terlalu dipolitisir dan pemerintah harus berani mengambil tindakan untuk mencegah hal tersebut (Lee, 2013, pp. 63–64).

- Tewasnya Ibu Park Geun Hye Akibat Simpatisan Korea Utara (*Sosialization Adults*)

  Selain faktor dari Partai Saenuri, faktor internal lainnya adalah Park Geun Hye memiliki pengalaman pahit dengan Korea Utara karena ayahnya yang juga mantan presiden Korea Selatan, Park Chung Hee pernah mengalami percobaan pembunuhan oleh intelijen Korea Utara. Ia menjadi sasaran pembunuhan oleh Korea Utara karena Park Chung Hee cenderung menempuh cara konservatif dan militer dalam menghadapi Korea Utara. Situasi semakin sulit ketika Korea Utara mencoba melakukan pembunuhan terhadap Park Chung Hee, dimana Ia selamat dalam kejadian tersebut (Streger, 2017).

  Sayangnya, dalam insiden ini, Ibu Park Geun Hye terkena tembakan dan meninggal dunia menyebabkan Ia harus menggantikan posisi ibunya sebagai ibu negara dalam usia 22 tahun. Sejak kematian ibunya, Park Geun Hye beserta adik-adiknya selalu di doktrin oleh sang ayah bahwa Korea Utara adalah negara yang kejam dan suka berperang. Pengalaman hidupnya yang pahit dengan Korea Utara menyebabkan Ia selalu memiliki kecurigaan tinggi dan tidak mudah percaya terhadap Korea Utara. Contoh nyata dari ketidakpercayaan Park Geun Hye terhadap Korea Utara bisa dilihat dari diadakannya kebijakan *Trust Politic* yang berisi bahwa, jika Korea Utara ingin menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan, maka negara tersebut harus menunjukannya komitmennya dengan mau melakukan denuklirisasi serta tidak melakukan tindakan provokatif terhadap Korea Selatan (Streger, 2017).

- Adanya Dukungan Masyarakat Terhadap Kebijakan Park Geun Hye (*Opinion Formation)*

  Faktor internal lainnya yang menyebabkan Park Geun Hye juga cenderung menempuh kebijakan konservatif terhadap Korea Utara, dimana terdapat besarnya dukungan masyarakat Korea Selatan terhadap berbagai kebijakan konservatif oleh Park Geun Hye pasca uji coba senjata nuklir Korea Utara. Situasi ini muncul karena adanya keresahan masyarakat Korea Selatan terhadap ancaman yang timbul dari Korea Utara. Respon lain juga muncul dari masyarakat Korea Selatan atas uji coba misil Korea Utara yang pelaksanaannya dilakukan beberapa hari pasca uji coba senjata nuklir sehingga masyarakat Korea Selatan merasa perlu untuk negaranya membuat kebijakan yang lebih tegas terhadap Korea Utara.

  Dengan adanya tindakan provokatif ini, masyarakat Korea Selatan membuat respon dengan menuntut pemerintah untuk membuat tindakan sanksi yang tegas. Adapun respon ini bisa dilihat dari demo dimana 150 orang berkumpul di pusat kota Seoul pada tanggal 7 Januari 2016 untuk

memprotes uji coba bom Hidrogen yang dilakukan oleh Korea Utara (BBC News Indonesia, 2016). Tidak hanya itu, berbagai tindakan protes juga dilakukan oleh masyarakat di wilayah Gwangju, Busan dan lainnya. Situasi demikian semakin meyakinkan Park Geun Hye bahwa tindakan tegas, keras dan isolatif adalah upaya tepat yang bisa dilakukan agar Korea Utara tidak lagi melakukan aksi provokasi kepada Korea Selatan. Tidak lama setelah berbagai protes dilakukan oleh masyarakat, Park Geun Hye kemudian memutus segala bentuk kerjasama dengan Korea Utara ditandai dengan ditutupnya KIC pada tahun 2016.

C. *External Setting of Decision Making*

- Aksi-Reaksi Antar Dua Korea yang Memburuk

  Selain faktor internal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga faktor eksternal yang menyebabkan Park Geun Hye semakin yakin untuk terus menempuh pendekatan konservatif. Park Geun Hye secara gamblang menyatakan kepada Korea Utara jika ingin menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan, maka hal utama yang harus dilakukan oleh Korea Utara adalah melakukan denuklirisasi. Padahal, senjata nuklir adalah kartu "As" bagi Korea Utara agar tetap mampu mempertahankan rezim Komunis di negara tersebut. Dengan senjata nuklir, Korea Utara memiliki *bargaining position* yang kuat dalam meja perundingan dan ini sudah dibuktikan oleh Korea Utara dengan membawa Korea Selatan, Jepang dan AS untuk memberikan bantuan kepada negara tersebut (Friedman, 2018).

  Jika tidak, maka Korea Utara melalui tindakan provokatifnya akan menyebabkan kerugian keamanan dan ekonomi bagi negara yang terkena dampak uji coba senjata Korea Utara. Tentunya Korea Utara dengan tegas menolak tawaran denuklirisasi dari Park Geun Hye sehingga aksi reaksi diantara dua Korea justru memburuk. Melihat situasi ini, Park Geun Hye yang merasa denuklirisasi tidak mungkin terjadi mulai secara nyata memberikan sikap permusuhan kepada Korea Utara seperti memutuskan kerjasama secara pihak dan bahkan melakukan latihan militer bersama AS secara rutin. Sikap Park Geun Hye ini kemudian direspon oleh Kim Jong Un sebagai pernyataan perang. Hasilnya, Korea Utara juga semakin agresif melakukan tindakan provokasi terhadap Korea Selatan yang kemudian direspon kembali oleh Park Geun Hye dengan tindakan tegas dan isolatif. Aksi reaksi antar kedua Korea yang cenderung negatif menyebabkan prospek perdamaian di Semenanjung Korea semakin jauh (Friedman, 2018).

- Loyalitas AS Dibawah Rezim Obama Terhadap Korea Selatan (*Societies Organized)*

  Faktor eksternal lainnya yang menyebabkan Park Geun Hye mengupayakan kebijakan konservatif dalam menghadapi Korea Utara adalah adanya dukungan penuh AS terhadap tindakan dari Park Geun Hye. Hal bisa dimengerti karena partai tempat Park Geun Hye bernanung, Partai Saenuri dikenal sebagai partai yang lebih menyukai hubungannya dengan

AS, baik hubungan ekonomi maupun keamanan. Ketika Park Geun Hye memimpin Korea Selatan, AS masih berada dibawah kepemimpinan Obama. Bentuk dukungan penuh AS terhadap Park Geun Hye bisa dilihat dari pernyataan Obama yang menyatakan bahwa *Trust Politic* yang dilakukan oleh Korea Selatan di Asia sebagai langkah *very compatible with my approach* (Hwang, 2010, pp. 68–70).

Bentuk dukungan AS lainnya juga bisa dilihat dari latihan militer gabungan dengan Korea Selatan pada tahun 2013 dimana latihan ini melibatkan 10.000 tentara Korea Selatan dan 3.000 tentara AS dengan biaya sebesar 200 miliar dolar. Adapun bentuk latihan ini meliputi latihan operasi maritim, pengintaian dan pendeteksian kapal selam, pelatihan pertahanan air dengan menggunakan anti rudal. Loyalitas hubungan persekutuan oleh AS juga mempengaruhi persepsi Park Geun Hye, bahwa menjalin hubungan baik dengan AS jauh lebih menguntungkan dibandingkan memperbaiki hubungan Korea Utara sehingga rezim Park Geun Hye percaya diri dalam menghadapi berbagai tindakan provokasi oleh Korea Utara (Hwang, 2010, pp. 68–70).

Dengan demikian, faktor-faktor inilah yang menyebabkan Park Geun Hye cenderung konservatif dalam menghadapi Korea Utara. Ia secara konsisten melancarkan sanksi dan kecaman, pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dan lebih banyak melibatkan AS dalam menghadapi Korea Utara sehingga menyebabkan hubungan dua Korea di masa pemerintahannya memburuk. Kebijakan konservatif oleh Park Geun Hye semakin diperparah dengan uji coba senjata nuklir Korea Utara pada tahun 2016 sehingga hubungan antar dua Korea tidak menemui titik terang hingga akhir masa jabatan Park Geun Hye akibat skandal suap pada tahun 2017 sehingga dirinya digantikan oleh Moon Jae In yang berasal dari partai oposisi.

2. Faktor Internal dan External Moon Jae In

A. Internal Setting of Decision Making

- Tercapainya Kepentingan Nasional Korea Selatan Akibat Kebijakan Kooperatif (*Human Environment*)

Faktor internal yang menyebabkan Moon Jae In cenderung menempuh kebijakan kooperatif terhadap Korea Utara adalah situasi domestik yang diuntungkan jika Korea Selatan lebih banyak mengupayakan hubungan kerjasama dengan Korea Utara. Hal ini bisa dilihat pasca pertemuan Moon Jae In dengan Kim Jong Un dalam deklarasi Panmunjom tahun 2018 menyebabkan kenaikan bursa saham Korea Selatan yang sebelumnya sempat menurun akibat uji coba senjata nuklir Korea Utara. Dari segi kepentingan ekonomi, indeks KOSPI ditutup menguat 33,84 poin atau 1,59% menjadi 2.195,08 setelah naik 0,21% di sesi sebelumnya (Allens, 2020).

Demikian juga indeks KOSPI 200 berjangka naik 4,76 poin atau 1,69% ke posisi 286.70, setelah sempat turun di posisi rendah 283.30 pasca uji

coba senjata nuklir Korea Utara tahun 2016 dan naik ke posisi tertinggi menjadi 288.30 di tahun 2018. Kekuatan KOSPI sepanjang sesi disupport oleh lompatan saham teknologi kapital besar setelah sebelumnya di zona merah, seperti saham *Samsung Electronics* naik 2,92 persen dan saham pembuat chip No. 2 SK hynix menambahkan 2,26 persen (Allens, 2020). Tidak hanya kepentingan ekonomi, dari segi kepentingan keamanan, situasi Korea Selatan jauh lebih aman dibandingkan dengan pemerintahan Park Geun Hye .

Hal ini dibuktikan oleh uji coba senjata rudal oleh Korea Utara mulai berkurang dan bahkan Korea Utara sejauh ini tidak lagi melakukan uji coba senjata nuklir yang dapat menggangu kestabilan keamanan dan ekonomi Korea Selatan. Hal ini bisa dimengerti karena hubungan antar dua Korea masih terjalin dengan baik meskipun terkadang Korea Utara tetap melakukan uji coba senjata rudal. Moon Jae In cenderung menempuh cara negosiasi, diplomasi dan komunikasi secara langsung untuk menyelesaikan masalah dengan Korea Utara yang kemudian direspon dengan baik oleh Kim Jong Un sehingga hubungan antar Korea relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya (N. Park, 2019).

B. Social Structure and Behaviour Moon Jae In

- Berasal dari Korea Utara dan Berteman Dekat dengan Roh Moh Hyun (*Adult Socialization*)

Kebijakan berbeda mulai ditempuh oleh Moon Jae In yang memang secara latar belakang sangat bertolak belakang dengan Park Geun Hye. Faktor internal menunjukkan bahwa Moon Jae In lahir dalam bayang-bayang perang. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1953 di Gyeongnam. Kedua orang tuanya merupakan pengungsi perang dari provinsi Hamgyeong Selatan, Korea Utara. Kedua orang tua Moon Jae In meninggalkan Korea Utara melalui Pelabuhan Timur Laut Heungnam dan mencari penampungan di Geoje yang merupakan wilayah Korea Selatan. Orang tua Moon, sebagai pencari suaka, berjuang keras untuk mendapat penghidupan. Ayah Moon Jae In adalah seorang penjual kaus kaki, sedangkan ibunya harus berjualan telur sambil menggendongnya (Planet Rulers, 2017).

Di tengah sulitnya kehidupan masa kecil Moon Jae In, Ia merupakan seorang anak yang cerdas. Ia membaca banyak buku yang dibelikan oleh ayahnya sepulang berjualan. Akibat kecerdasannya, Ia diterima di sekolah bergengsi SMP Gyeongnam Busan. Ia juga melanjutkan pendidikannya di SMA Kyungnam dan mulai menumbuhkan jiwa aktivisnya di bangku pendidikan ini. Tidak sampai disitu, Moon Jae In juga diterima di salah satu Universitas terbaik di Korea Selatan yakni Universitas Kyung Hee dengan beasiswa penuh. Karir politiknya sendiri dimulai saat ia duduk dibangku kuliah dimana ia memimpin protes revitalisasi reformasi terhadap *Yushin Constitution* yang dikepalai oleh presiden Park Chung Hee, ayah dari Park Geun Hye. Akibatnya, ia dikeluarkan dari bangku kuliah dan ditahan atas tuntutan pelanggaran demokrasi (Planet Rulers, 2017).

Pasca dikeluarkannya ia dari bangku kuliah, Moon Jae In kemudian memutuskan untuk bergabung dalam wajib militer. Setelah menyelesaikan wajib militernya tahun 1978, Moon Jae In kembali ke studinya dan memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1982, dimana Ia menyandang gelar sebagai predikat terbaik kedua di kelasnya. Ia juga lulus dalam ujian pengacara, namun karena catatan keterlibatannya pada protes anti pemerintah, Ia di-diskualifikasi sebagai kandidat hakim dan memutuskan pindah ke Busan (Stephanie, 2018). Di tempat inilah Moon Jae In memulai karirnya sebagai pengacara Hak Asasi Manusia (HAM). Karirnya sebagai advokat HAM mempertemukannya dengan Roh Moh Hyun, dimana keduanya bersama-sama mendirikan firma hukum. Karir politik Moon Jae In murni dilatarbelakangi oleh persahabatannya dengan Roh Moh Hyun, dimana Moon Jae In pertama kali terlibat dalam politik sebagai ketua pemenangan Roh Moh Hyun ketika sahabatnya tersebut mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2002 (Y. S. Kim, 2018)

Pada saat Roh Moh Hyun sudah menjabat sebagai presiden, Ia emudian mencari Moon Jae In untuk menjadi sekretaris senior urusan sipil. Kemudian tahun 2007, Moon Jae In naik jabatan menjadi kepala staff kepresidenan. Terdapat sedikit banyak pemikiran Moon dan Roh yang memiliki kesamaan, terutama menyangkut Korea Utara. Dalam berbagai diskusi tersebut, keduanya sepakat bahwa menjalin kerjasama dengan Korea Utara adalah tindakan tepat, sehingga Roh Moh Hyun kemudian mengaktifkan kembali kebijakan *Sunshine Policy* yang sebelumnya tidak dijalankan oleh Lee Myung Bak. Roh Moh Hyun kemudian berhasil mengadakan kunjungan ke Korea Utara untuk membahas kerjasama pariwisata di Gunung Kumgang serta memperluas kawasan Industri Kaesong dimana kunjungannya ini diterima dengan baik oleh Kim Jong Il. Dalam hal ini, Moon Jae In merupakan penanggungjawab pertemuan Roh dengan Kim Jong Il dan secara tidak langsung, Ia juga adalah salah satu pelopor berdirinya Kawasan Industri Kaesong (Y. S. Kim, 2018).

- Berasal dari Partai Liberal Korea Selatan (*Major Institutional Patterns*)

Disamping faktor latar belakang Moon sebagai keturunan Korea Utara serta rekam jejak pendidikan, jiwa aktivisnya dan lingkungan pertemanan Moon Jae In dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dengan dirinya seperti Roh Moh Hyun, faktor internal lainnya yang mempengaruhi persepsi Moon Jae In juga berasal dari lingkungan partai politik yang mempengaruhi arah kebijakannya terhadap Korea Utara. Ia berasal dari Partai Minjoo yang merupakan Partai Demokrat Liberal Korea Selatan. Partai ini adalah salah satu dari dua partai besar bersama dengan Partai Saenuri yang dipimpin oleh Park Geun Hye (Hahm & Heo, 2020).

Partai Minjoo cenderung lebih demokratis serta moderat karena partai ini bersandar pada nilai persamaan, kebebasan, perdamaian dan kerjasama. Partai ini mendukung normalisasi hubungan dengan Korea Utara yang ditandai dengan kebijakan *Sunshine Policy* di awal tahun 2000. Pemimpin Korea Selatan yang berasal dari partai ini seperti Kim Dae Jung (pencetus kebijakan *Sunshine Policy*), Roh Moh Hyun dan Moon Jae In

yang memiliki pemahaman yang sama dengan Korea Utara, yaitu menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan Korea Utara demi terciptanya hubungan dua Korea yang lebih baik. Roh Moh Hyun dan Moon Jae In sendiri diketahui merupakan dua pemimpin Korea Selatan yang mengidolakan Kim Dae Jung dan menjadikan Kim Dae Jung sebagai *role model* mereka karena kebijaksanaanya dalam menghadapi Korea Utara serta keberhasilannya dalam mewujudkan Semenanjung Korea yang relatif damai (Hahm & Heo, 2020).

- Dukungan Masyarakat Terhadap Kebijakan Kooperatif Moon Jae In *(Opinion Formation)*

  Akibat situasi yang semakin membaik, ditandai dengan menguatnya saham berbagai perusahaan Korea Selatan, perekonomian yang semakin stabil serta situasi keamanan yang lebih terjaga, situasi ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap Korea Utara. Dilansir dari *Asan Public Opinion Report* tahun 2018*,* pandangan mengenai reunifikasi dengan Korea Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan *image* Korea Utara yang awalnya negatif dimana masyarakat memandang negara tersebut sebagai ancaman dan perlu ditanggapi dengan cara yang tegas dan keras, kini perlahan menjadi lebih positif dimana masyarakat menyatakan bahwa Korea Utara bukanlah musuh, melainkan saudara satu nenek moyang. Tidak hanya itu, pandangan skeptis mengenai reunifikasi pun semakin berkurang, dimana masyarakat Korea Selatan juga mendukung upaya tersebut dan menyebutkan bahwa reunifikasi adalah tujuan utama bagi Korea Selatan saat ini.

  Kapan persisnya akan terjadi reunifikasi memang tidak bisa dipastikan, namun masyarakat Korea Selatan tetap berharap akan hal tersebut. Adapun hasil laporan dari *Asan Public Opinion Report* mengenai pandangan masyarakat Korea Selatan terhadap reunifikasi Korea pada tahun 2018, sebesar 33,3% menyatakan setuju untuk reunifikasi demi pertumbuhan ekonomi dan 28,7% untuk menghentikan ancaman perang. Tidak hanya itu, Direktur *Youth and Future*, Jung Hyung Gon, menyebutkan dalam surveinya ke universitas-universitas di Korea Selatan, 7 dari 10 (67,2%) mahasiswa mengatakan bahwa kerjasama yang lebih besar dengan Korea Utara sangat dibutuhkan. Selain itu, beberapa dari mereka juga memilih untuk reunifikasi karena dianggap dapat mengurangi pelanggaran HAM terutama di Korea Utara, seperti penghilangan paksa, penculikan, pembunuhan dan perbudakan dimana hal ini juga didukung oleh laporan *Amnesty International* (Miller, 2018).

  Hal ini berbanding terbalik dengan opini masyarakat Korea Selatan mengenai AS. Berdasarkan hasil laporan *Asan Public Report*, pada awalnya, terutama di era pasca perang, masyarakat Korea Selatan melihat AS sebagai pahlawan yang telah membantu Korea Selatan untuk kembali bangkit. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dimulai dari masa pemerintahan Roh Moo Hyun hingga Moon Jae In saat ini, masyarakat mulai melihat AS justru sebagai hambatan, bahkan ancaman bagi Korea Selatan. Hambatan yang dimaksud adalah hambatan untuk reunifikasi,

dimana AS dianggap tidak bisa membantu Korea Selatan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Korea Utara, karena upaya yang dilakukan selama ini selalu melalui jalur militer. Upaya negosiasi lebih disukai oleh masyarakat karena menurut mereka, upaya militer justru semakin memperburuk hubungan antar dua Korea selama bertahun-tahun.

Sementara itu, AS juga dianggap sebagai ancaman karena masyarakat melihat peningkatan hubungan dengan AS, terutama dari sisi militer, tidak mengurangi ancaman nuklir dari Pyongyang. Pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, semakin dekat Korea Selatan dengan AS, semakin sering pula Korea Utara mengancam akan melakukan uji coba senjata nuklir. Misalnya, ketika tentara Korea Selatan beberapa kali sempat akan melakukan latihan militer bersama tentara AS, saat itu juga Korea Utara memberikan ancaman dengan menembakkan rudalnya ke Seoul. Pandangan ini juga diperkuat dengan kebijakan Trump yang memangkas anggaran militer ke Korea Selatan dengan alasan hanya akan menghabiskan anggaran AS, sehingga masyarakat Korea Selatan semakin mendukung upaya damai diantara dua Korea. Situasi domestik dimana masyarakat semakin mendukung upaya kooperatif Moon Jae In menyebabkan Ia semakin mengupayakan cara kooperatif terhadap Korea Utara.

C. *External Setting of Decision Making*

- Berkurangnya Loyalitas Payung Keamanan AS Dibawah Rezim Trump (*Societies Organized*)

  Selain adanya faktor internal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga faktor-faktor eksternal yang juga mempengaruhi kebijakan Moon Jae In terhadap Korea Utara. Faktor pertama adalah adanya perubahan orientasi kebijakan AS dibawah rezim Donald Trump terhadap hubungan aliansinya dengan Korea Selatan. Donald Trump sendiri dikenal sebagai pemimpin dengan kebijakan selektif seleksionisnya dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara lainnya (Ferier, 2020).

  Trump diketahui telah membatasi jumlah anggaran militer negaranya untuk keperluan latihan gabungan militer dengan Korea Selatan. Hal ini bisa dilihat dari dibatalkannya sejumlah latihan gabungan militer oleh Trump dengan alasan kebijakan ini banyak menghabiskan anggaran militer AS, dimana dalam satu kali pelaksanaannya bisa menghabiskan 200 miliar dolar. Sikap Trump ini menyebabkan Moon Jae In mempertanyakan kredibilitas aliansinya dengan AS. Terbatasnya jumlah latihan gabungan militer oleh AS juga diperparah dengan situasi Covid-19 yang menyebabkan AS dan Korea Selatan untuk membatalkan rencana latihan militer gabungan mereka pada tahun 2020, sehingga situasi ini mendorong Moon Jae In harus tetap bersikap kooperatif dengan Korea Utara (Ferier, 2020).

- Aksi-Reaksi Dua Korea yang Membaik

  Keinginan Moon Jae In untuk lebih mengupayakan sikap kooperatif direspon dengan baik oleh Korea Utara. Kim Jong Un secara terbuka ingin menerima tawaran Moon Jae In. Dimulai dari bertemu langsung dalam

deklarasi Panmunjom pada tahun 2018, dimana pada tahun ini keduanya bertemu secara langsung sebanyak tiga kali. Tidak hanya itu, Moon Jae In juga mengajak Korea Utara untuk bergabung dalam kegiatan internasional seperti *Asian Games* di Jakarta tahun 2018, dimana kedua negara memutuskan untuk mejadi satu tim dalam olimpiade tersebut (Baynes, 2018). Jika diperhatikan lebih jauh, Moon Jae In adalah pemimpin Korea Selatan yang paling banyak bertemu secara langsung dengan pemimpin Korea Utara dibandingkan presiden-presiden Korea Selatan sebelumnya. Kedekatan antara Moon Jae In dan Kim Jong Un juga tetap berlanjut melalui komunikasi secara tidak langsung seperti telepon dan surat.

Berbeda halnya dengan Park Geun Hye yang sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung dengan Kim Jong Un, Moon Jae In justru lebih banyak mengupayakan komunikasi karena Ia menyadari bahwa komunikasi adalah kunci penting dalam menjaga keharmonisan antara dua Korea. Tindakan Moon Jae In berhasil meredakan ketegangan di kawasan Semenanjung Korea, karena Korea Utara sendiri mulai lebih terbuka dengan Korea Selatan yang dibuktikan dengan ketiadaan uji coba senjata nuklir serta menurunnya jumlah uji coba rudal Korea Utara. Aksi reaksi antar dua Korea yang cenderung membaik menyebabkan Moon Jae In semakin mengupayakan kebijakan kooperatif demi mewujudkan stabilitas keamanan kawasan. Keputusan untuk menjalin hubungan baik dengan Korea Utara merupakan langkah bijak dan penuh perhitungan melalui koridor *New Sunshine Policy* miliknya (The Republic of Korea Cheong Wa Dae, n.d.).

Moon Jae In, melalui kebijakan *New Sunshine Policy*, juga harus menempatkan Korea Selatan secara hati-hati karena Ia harus tetap merangkul Korea Utara ditengah hubungan aliansinya dengan AS, mengingat kebijakan terhadap Korea Utara bukanlah perkara mudah. Moon Jae In menempatkan Korea Selatan diantara AS dan Korea Utara, dimana langkah pertama adalah Korea Selatan akan menjadi fasilitator bagi kedua negara untuk mencapai negosiasi. Dalam hal ini, Moon Jae In berhasil melaksanakan upaya negosiasi keduanya melalui *Trump-Kim Summit* di Singapura tahun 2018, meskipun pertemuan ini belum mencapai kesepakatan. Trump-Kim kemudian kembali menggelar pertemuan di Vietnam. Sayangnya dalam pertemuan ini keduanya kembali tidak menemukan kesepakatan, sehingga menempatkan kebijakan Moon Jae In menghadapi dilema. Di satu sisi, Moon Jae In dituntut agar lebih pro-aktif daripada hanya menjadi penengah antara AS dan Korea Utara (Sanger, 2019).

Di sisi lain, Moon Jae In juga tidak bisa serta merta menjadi juru bicara Kim Jong Un atau seratus persen berada di pihak AS *(Korea-Led Principle)*. Dengan adanya prinsip *Korea-led,* Moon Jae In menempatkan Korea Selatan sebagai penentu arah perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam hal ini, terlihat bahwa Moon Jae In memiliki pribadi percaya diri tinggi untuk mengendalikan situasi. Ia juga meyakini bahwa sudah sepatutnya Korea Selatan menjalankan *balanced diplomacy* terkait isu nuklir Korea Utara,

dimana Korea Selatan tetap mempertahankan posisinya untuk tidak memihak aliansi militer AS dan Jepang (Korea Herald, 2017). Perbedaan kecenderungan kebijakan antara Moon Jae In dan Park Geun Hye dapat dilihat melalui prinsip tersebut. Misalnya dibawah rezim Park Geun Hye, banyak kerjasama antar dua Korea sebelumnya yang gagal karena diputus secara sepihak oleh Park Geun Hye. Jumlah kerjasama antar dua Korea berkurang drastis akibat tindakan provokatif Korea Utara dan sikap keras Park Geun Hye sendiri.

Situasi perekonomian Korea Selatan semakin terpuruk akibat rutinnya aktivitas peluncural rudal dan uji coba bom nuklir sehingga menyebabkan terguncangnya pasar saham di Korea Selatan, berbeda dengan Moon Jae In yang terdapat peningkatan hubungan kerjasama antar dua Korea yang sebelumnya sempat tersendat di masa pemerintahan Park Geun Hye. Kerjasama tersebut mencakup ekonomi, sosial, budaya dan bahkan olahraga. Peningkatan kerjasama ini akhirnya berdampak pada situasi perekonomian Korea Selatan yang pasar sahamnya lebih stabil akibat berkurangnya intensitas peluncuran rudal oleh Korea Utara (Fendos, 2017). Park Geun Hye tidak pernah menemui Kim Jong Un dalam berbagai pertemuan bilateral atau multilateral dan lebih memilih agar perwakilannya yang dapat menemui pihak Korea Utara. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kim Jong Un yang lebih mengirimkan utusannya untuk menemui utusan Park Geun Hye. Berbeda dengan Moon Jae In yang berhasil mengadakan kontak langsung dengan Kim Jong Un sebanyak 3 kali di tahun 2018.

Kontak langsung yang dilakukan Moon tidak dengan cara mengirimkan perwakilan, namun datang menemuinya secara langsung. Kim Jong Un juga lebih menyukai gaya kepemimpinan Moon Jae In yang dianggapnya lebih memahami Korea Utara, sehingga komunikasi yang terjalin ini mulai membuka prospek perdamaian di Semenanjung Korea kearah yang lebih baik. Selain itu, dimasa kepemimpinan Park Geun Hye, tensi konflik antar kedua Korea meningkat drastis akibat tindakan agresif Korea Utara yang terus mengirim rudal ke Korea Selatan dan bahkan menguji coba bom nuklirnya tahun 2016. Tindakan Korea Utara ini direspon oleh Park dengan memutus semua kerjasama dengan Korea Utara dan memperkuat aliansinya dengan AS. Hal inilah yang menyebabkan hubungan antar dua Korea berada pada masa krisis. Berbeda dengan kepemimpinan Moon Jae In, dimana tensi konflik antar dua Korea mulai berkurang dikarenakan kedua negara lebih banyak mengupayakan kerjasama, meskipun Korea Utara terkadang tetap bersikap provokatif.

Namun, Moon Jae In berusaha untuk lebih mengupayakan diplomasi dan negosiasi dengan Korea Utara, sehingga menyebabkan tensi konflik antar dua Korea mulai berkurang. Terakhir, jumlah bantuan kemanusiaan ke Korea Utara di masa pemerintahan Park Geun Hye bahkan mencapai titik terendah dibandingkan Presiden Lee Myung Bak. Hal ini disebabkan karena Park Geun Hye ingin memberikan bantuan kemanusiaan, jika Korea Utara bersedia melakukan denuklirisasi. Total bantuan dimasa pemerintahan Park Geun Hye hanya 100 miliar dolar selama masa

pemerintahannya. Berbeda dengan kepemimpinan Moon Jae In, dimana jumlah bantuan kemanusiaan ke Korea Utara meningkat drastis. Di tahun 2019, jumlah bantuannya mencapai 115 miliar dolar, tahun 2018 mencapai 110 miliar dolar dan tahun 2017 mencapai 106 miliar dolar. Total jumlah bantuan di masa pemerintahan Moon untuk Korea Utara mencapai 331 miliar dolar.

PENGARUH PARTAI SAENURI DAN PARTAI MINJOO DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PARK GEUN HYE DAN MOON JAE IN TERHADAP ISU SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

Partai Besar Nasional *(Grand National Party)* atau Partai Saenuri didirikan pada tahun 1997 dari hasil penggabungan antara Partai Persatuan Demokratik dan Partai Korea Baru, dimana kedua partai ini sebelumnya berasal dari Partai Republik Demokratik yang dirikan oleh Park Chung Hee (KBS World, 2017). Partai Saenuri yang memang doktrin partainya berasal dari Park Chung Hee kemudian dikenal luas sebagai partai konservatif. Partai ini disebut konservatif karena partai ini berisikan kaum konservatif pro-bisnis terutama terhadap *Chaebol* (Konglomerat Korea Selatan) yang dikenal anti Komunis yang mendukung pendirian konfrontatif dan garis keras melawan musuh mereka. Partai ini lebih menyukai hubungannya dengan AS, baik itu hubungan ekonomi maupun keamanan. Pendukung partai ini berasal dari generasi lebih tua yang hidup melalui kemiskinan sebelum industrialisasi yang pesat dan provinsi Tenggara Korea Selatan. Tidak hanya Park Geun Hye yang keras dalam menghadapi Korea Utara, presiden sebelumnya yang berasal dari partai sama, Lee Myung Bak juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan keras terhadap Korea Utara (Swenson-Wright, 2015).

Keduanya juga tidak melanjutkan kebijakan *sunshine policy* serta sering memutuskan secara sepihak hubungan kerjasama dan pemberian bantuan kemanusiaan ketika Korea Utara melanjutkan pengembangan nuklirnya. Partai Saenuri juga dikenal sebagai partai yang memiliki hubungan erat dengan militer, karena latar belakang dari Park Chung Hee sebagai pendiri nilai konservatif Saenuri memang berasal dari kalangan militer, sehingga menyebabkan partai ini memiliki hubungan yang baik dengan militer (Swenson-Wright, 2015). Hal ini bisa dilihat pada rezim Park Geun Hye, dimana Menteri Pertahanan, Han Min Koo serta ketua *National Security Office*, Kim Kwan Jin, dipilih sebagai penasihat presiden dalam urusan kebijakan luar negeri. Kedua tokoh ini dikenal sebagai sosok yang sangat konservatif dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Korea Utara. Latar belakang keduanya yang murni militer membuat keduanya cenderung bergerak tanpa mempertimbangkan persepsi publik (Wertz, 2017).

Situasi berbeda justru dialami oleh Partai Demokrat Bersatu (*Minjoo Party*) tempat Moon Jae In berasal. Partai Minjoo yang dibentuk sejak tanggal 26 Maret 2014 ini cenderung lebih demokratis serta moderat, karena partai ini bersandar pada nilai persamaan, kebebasan, perdamaian dan kerjasama. Cikal bakal dari Partai Minjoo, yakni Partai Demokrat Korea yang didirikan langsung oleh Kim Dae Jung pada tahun 1995. Nilai-nilai dari partai ini yaitu mendukung pencairan hubungan dengan Korea Utara yang ditandai dengan kebijakan *Sunshine Policy* di awal tahun 2000. Pemimpin

Korea Selatan yang berasal dari partai ini seperti Kim Dae Jung (pencetus kebijakan *Sunshine Policy*), Roh Moh Hyun dan Moon Jae In memiliki pemahaman yang sama dengan Korea Utara yaitu menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan Korea Utara demi terciptanya hubungan dua Korea yang lebih baik. Roh Moh Hyun dan Moon Jae In sendiri diketahui merupakan dua pemimpin Korea Selatan yang mengidolakan Kim Dae Jung dan menjadikan Kim Dae Jung sebagai *role model* mereka karena kebijaksanaannya dalam menghadapi Korea Utara serta keberhasilannya dalam mewujudkan Semenanjung Korea yang relatif damai (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019).

Nilai-nilai partai akan persamaan, kebebasan, perdamaian dan kerjasama ini muncul dari pemahaman Kim Dae Jung terhadap fenomena penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur akibat Perang Dingin pada tahun 1990. Kim Dae Jung menganggap bahwa situasi demikian juga bisa terjadi di Semenanjung Korea, dimana upaya yang bisa dilakukan untuk itu adalah dengan lebih banyak mengupayakan kebijakan kooperatif terhadap Korea Utara, karena negara tersebut sejatinya memiliki potensi yang besar jika diajak bekerjasama. Selain karena adanya fenomena tersebut, latar belakang keluarga Kim Dae Jung yang sejak awal dididik sebagai orang yang demokratis oleh kedua orang tuanya juga mempengaruhi karakter Kim Dae Jung sebagai sosok pantang menyerah, moderat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Hal inilah yang menyebabkan Partai Demokrat Korea dan Partai Minjoo sejak awal selalu mengupayakan tindakan kooperatif dengan Korea Utara, karena negara tersebut tidak hanya dianggap sebagai musuh potensial, tetapi kawan potensial mengingat upaya kerjasama adalah tindakan paling bijaksana dan aman agar tensi konflik antar dua Korea semakin berkurang (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019).

KESIMPULAN

Faktor-faktor seperti latar belakang, pengalaman hidup, lingkungan partai dan pertemanan, situasi domestik dan internasional, peran AS serta aksi reaksi antar dua Korea yang berbeda juga mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri antara Park Geun Hye dan Moon Jae In yang juga mempengaruhi prospek perdamaian diantara dua Korea. Dalam hal ini, Moon Jae In cenderung membuka prospek perdamaian diantara dua Korea karena kebijakannya yang cenderung kooperatif ditandai dengan berkurangnya intensitas konflik diantara dua Korea. Meskipun menempuh cara yang berbeda, kedua pemimpin ini memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai kepentingan nasional Korea Selatan ditengah ancaman senjata nuklir Korea Utara. Mengingat situasi Semenanjung Korea masih berada dalam status perang, segala kebijakan yang ditempuh harus penuh perhitungan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar dan Moon Jae In dalam hal ini telah melakukan berbagai kebijakan secara hati-hati agar hubungan antar dua Korea tetap stabil dan akhirnya menguntungkan Korea Selatan.

REFERENSI

2018 Inter-Korean Summit Preparation Committee. (2018). *Peace, A New Future: 2018 Inter-Korean Summit Pyeongyang*. https://overseas.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20181203041010096.pdf&rs=/viewer/result/202106

Allens, J. (2020, June 24). *Bursa Saham Korsel 24 Juni Menguat Setelah Korut Tunda Aksi Militernya*. Vibiznews.Com. https://www.vibiznews.com/2020/06/24/bursa-saham-korsel-24-juni-menguat-setelah-korut-tunda-aksi-militernya/

Anggaraini, S. A., & Rani, F. (2019). Motivasi Park Geun Hye Menerapkan Kebijakan Trust Politic Dalam Menghadapi Korea Utara Pada Tahun 2013-2016. *JOM FISIP Universitas Riau*, *6*(I), 1–9. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23129

Baynes, C. (2018, August 18). *Unified Korea athletes cheered by thousands as they parade together at Asian Games opening ceremony*. Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/asia/unified-korea-athletes-asian-games-opening-ceremony-north-south-kim-jong-un-a8497521.html

BBC News Indonesia. (2016, January 7). *Protes warga Korea Selatan terhadap bom Korea Utara*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107_dunia_korsel_korut

Biswara, B. (2018). Mengurai Kode Politik Korea Selatan: Analisis Terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae In (2017-2018). *Jurnal Penelitian Politik*, *11*(2), 206–224. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v11i2.10975

Choe, S. H. (2016, February 10). *South Korea to Shut Joint Factory Park, Kaesong, Over Nuclear Test and Rocket*. The New York Times. https://www.nytimes.com/2016/02/11/world/asia/north-south-korea-kaesong.html/

Daftar Negara Dengan Senjata Nuklir di Dunia: Rusia Terbanyak (P. A. Rizky, Trans.). (2020, April 13). Matamatapolitik. https://www.matamatapolitik.com/daftar-negara-nuklir-dan-jumlah-senjata-nuklir-yang-mereka-miliki/

Fendos, J. (2017, January 24). *The History of Scandal : How South Korea's President Was Impeached*. The Diplomat. https://thediplomat.com/2017/01/the-history-of-a-scandal-how-south-koreas-president-was-impeached/

Ferier, K. (2020, September 23). *South Korea President Stresses Peace, Inclusiveness and Multilateralism at UN*. The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/09/south-korea-president-stresses-peace-inclusiveness-and-multilateralism-at-un/

Friedman, U. (2018, June 26). *The Mystery at The Heart of North Korea Talk*. Scribd. https://www.scribd.com/article/382606163/The-Mystery-At-The-Heart-Of-North-Korea-Talks

General Assembly Security Council. (2017, August 31). *Peacebuilding and Sustaining Peace*. https://www.mofa.go.kr

Hahm, S. D., & Heo, U. (2020). President Moon Jae In at Midterm : What Affects Public Support For Moon Jae In? *Journal of Asian and African Studies*, *55*(8), 1128–1142. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0021909620911145

Handayani, M. P. (2020, April 19). *Korea Utara Terdampak Covid-19, Moon Jae In dan Donal Trump Setuju Berikan Bantuan Kemanusiaan* (E. R. Putri (Ed.)). Tribunnewswiki.Com. https://www.tribunnewswiki.com/2020/04/19/korea-utara-terdampak-covid-19-moon-jae-in-dan-donald-trump-setuju-berikan-bantuan-kemanusiaan

Hasan, A. M. (2018, August 9). *Mengapa Sekutu Memilih Hiroshima dan Nagasaki Untuk Dibom?* Tirto.Id. https://tirto.id/mengapa-sekutu-memilih-hiroshima-nagasaki-untuk-dibom-cucQ

Hasibuan, L. (2020, March 7). *Wabah Corona Bikin Korut dan Korsel Mesra*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200307202142-4-143226/wabah-corona-bikin-korut-korsel-mesra

Heo, U., & Woo, J. Y. (2008). The North Korea Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospect. *Korea Observer*, *39*(4), 487–506. https://www.researchgate.net/publication/259945206_The_North_Korean_Nuclear_Crisis_Motives_Progress_and_Prospects

Holsti, K. J. (1992). *International Politics a Framework for Analysis*. A Simon & Schuster Company.

Hu, E. (2016, February 10). *South Korea Shutting Down Joint Industrial Park in North Korea*. National Public Radio (NPR). https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/02/10/466254605/south-korea-shutting-down-joint-industrial-park-in-north-korea

Hwang, E.-G. (2010). What if a Big Bang Occurs on the Korean Peninsula? In *The Search for a Unified Korea* (1st ed., Vol. 3, Issue 1, pp. 57–99). https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1562-7

KBS World. (2017, February 14). *Partai Saenuri Secara Resmi Mengubah Nama Menjadi "Partai Kebebasan Korea."* Partai Saenuri Secara Resmi Mengubah Nama Menjadi Partai Kebebasan Korea

KBS World. (2020, June 28). *Catatan Tentang Nuklir dan Rudal Korea Utara*. http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/history/nucleus_history.htm?lang=i

Kim, J. (2018, May 28). *Moon and Kim reaffirm commitment to Panmunjom Declaration*. Hankyoreh. http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/846575.html

Kim, K.-S. (2001). Political Future of The Korean Peninsula a New Challenge to Unification Strategies. *International Journal of Korean Studies*, *V*(2), 141–157. http://icks.org/n/data/ijks/1482456353_add_file_8.pdf

Kim, S. (2020, January 17). *Moon Jae In is Serious About Inter Korean Cooperation*. The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/01/moon-jae-in-is-serious-about-inter-korean-cooperation/

Kim, Y. S. (2018, April 26). *Moon Jae In: South Korea President With Humble Roots*. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-39860158

Korea.net. (2018, May 22). *Korean act to remove threat of war on peninsula*. https://m.korea.net/english/Government/Current-Affairs/National-Affairs/view?affairId=750&subId=678&articleId=164977&viewId=45290

Korea Herald. (2017, November 6). *Moon's balanced diplomacy*. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171106000476

Ku, Y. (2019). Privatized Foreign Policy? Explaining The Park Geun Hye Administration Decision Making Process. *Korea Journal*, *59*(1), 106–134. https://doi.org/10.25024/kj.2019.59.1.106

Kurniawan, S. S. (2015, September 8). *Bikin panas Korea Utara, AS dan Korea Selatan gelar latihan militer gabungan*. Kontan.Co.Id. https://internasional.kontan.co.id/news/bikin-panas-korea-utara-as-dan-korea-selatan-gelar-latihan-militer-gabungan

Lee, S. Y. (2013). North Korea Exceptionalism and South Korea Conventionalism. *Asia Policy*, *15*, 62–68. http://www.jstor.org/stable/24905209

Miller, S. (2018, November 30). *South Korean Youths Favor Unification with North*. VOA News. https://www.voanews.com/east-asia-pacific/south-korean-youths-favor-unification-north

Nadhiva, F. (2018). Reorientation of The Republic of Korea's Foreign Policy Towards The Democratic People's Republic of Korea in Reunification Efforts (2017-2019). *Jurnal Global Strategis*, *13*(2), 157–170. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.157-170

Pardo, R. P. (2018, March 14). *Moon on a Mission: South Korea's New Approach to the North*. The Diplomat. https://thediplomat.com/2018/03/moon-on-a-mission-south-koreas-new-approach-to-the-north/

Park, N. (2019, December 31). *South Korea Groundhog Year*. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2019/12/31/south-korea-2019-moon-diplomacy-groundhog-year/

Park, Y. H. (2014). *South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations* (pp. 1–21).

Planet Rulers. (2017, May 10). *President of South Korea*. https://planetrulers.com/south-korea-president/

Power, J. (2020, June 20). *Moon Jae In's Vision of Peace With North Korea Goes Up in Smoke*. South China Morning Post (SCMP). https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3089859/moon-jae-ins-vision-peace-north-korea-goes-smoke

Putra, A. F. P. (2016). Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un Dalam Proliferasi Nuklir Terhadap Korea Selatan Tahun 2013-2015. *JOM FISIP Universitas Riau*, *3*(2), 1–10. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/9934

Reiter, D. (2012, October 25). *Democratic Peace Theory*. Oxford Bibliographies. https://doi.org/10.1093/OBO/9780199756223-0014

Rosyidin, M. (2010). Integrasi Struktur dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik. *Jurnal Global*, *10*(2), 150–162. https://doi.org/https://doi.org/10.7454/global.v10i2.278

Saeed, F. A., & Przystup, J. J. (2011). Korean Future: Challenge to US Diplomacy of North Korean Regime Collapse. In *Strategic Perspectives* (No. 7). https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-7.pdf

Sanger, D. E. (2019, March 2). *How The Trump-Kim Summit Failed : Big Threats, Big Egos, Bad Bets*. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/02/world/asia/trump-kim-jong-un-summit.html

Situmorong, A. (2016, January 6). *Uji Coba Nuklir Korut Menekan Penutupan Bursa Korsel*. Vibiznews.Com. https://www.vibiznews.com/2016/01/06/uji-coba-nuklir-korut-menekan-penutupan-bursa-korsel/

Snyder, S. (2016). South Korean Identity Under Park Geun-Hye: Crosscurrents & Choppy Waters. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*, *7*(1), 104–112. https://keia.org/wp-content/uploads/2020/05/joint_us-korea_2016_-_sk_identity.pdf

Stephanie, R. (2018, November 28). *Moon Jae In: Five Things to Know*. Asia Media Centre. asiamediacentre.org.nz

Straub, D. (2018). Salvaging The Sunshine Policy. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*, *1*(2), 15–30. http://keia.org/sites/default/files/publications/jukas_1.1_salvaging_the_sunshine_policy.pdf

Streger, I. (2017, March 10). *A Tragic Life : Park Geun Hye's Descent From South Korea's First Lady to Impeached President*. Quartz.Com. https://qz.com/929497/a-tragic-life-park-geun-hyes-descent-from-first-lady-to-impeached-president/

Stueck, W. (1999). *The Korean War: An International History*. Princeton University Press.

Sudirman, A. (2018). Korea Selatan dan Provokasi Korea Utara : Taktik, Pengaruh dan Persuasi Pada Masa Pemerintahan Lee Myung Bak. *Jurnal Wacana Politik*, *3*(1), 79–93. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.14215

Swenson-Wright, J. (2015). Park Geun-hye, foreign policy innovation and risk on the Korean peninsula. *Security and Conflict in East Asia*. https://doi.org/10.4324/9781315850344-18

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2019, January 15). *Democratic Party of Korea*. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Democratic-Party-of-Korea

The Republic of Korea Cheong Wa Dae. (n.d.). *Moon Jae-In: President of The Republic Korea*. www.president.go.kr

United Kingdom Parliement: House of Commons Foreign Affairs. (n.d.). *CNS Technical Assesment of North Korean Balistic Missile Capabilities*. https://publications.parliament.uk/

Utomo, A. P. (2020, June 16). *China Punya 320 Senjata Nuklir, Korea Utara 30-40*. Kominfo. https://www.kompas.com/global/read/2020/06/16/194147070/china-punya-320-senjata-nuklir-korea-utara-30-40

Wertz, D. (2017). Inter-Korean Relations. In *The National Comittee on North Korea*. https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/inter-korean-relations

Wijaya, A. (2012, December 20). *Park Geun Hye Utamakan Keamanan Nasional dan Korut* (H. Barus (Ed.)). Investor.Id. https://investor.id/archive/park-geun-hye-utamakan-keamanan-nasional-dan-korut

Wirayudha, R. (2018, May 3). *Tangan Dingin Moon Jae In*. Historia. https://historia.id/politik/articles/tangan-dingin-moon-jae-in-DAog7/page/3

Wong, E. (2019, June 26). *U.S. Versus China: A New Era of Great Power Competition, but Without Boundaries*. The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/06/26/world/asia/united-states-china-conflict.html

Young, W. K. (2001). Overcoming The Cold War Legacy in Korea? The Inter-Korean Summit One Year Later. *International Journal of Korean Studies*, *V*(2), 1–24. http://icks.org/n/data/ijks/1482456353_add_file_1.pdf

Yun, B. (2013). Park Geun-hye's Trustpolitik: A New Framework for South Korea's Foreign Policy. *Global Asia*, *8*(3), 8–15. https://globalasia.org/v8no3/cover/park-geun-hyes-trustpolitik-a-new-framework-for-south-koreas-foreign-policy_yun-byung-se